

KONTRIBUSI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI MISI PERDAMAIANDI LEBANON TAHUN 2021-2022

Helmi Gunawan¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Usaha perdamaian yang dilakukan Indonesia tidak dapat dikatakan kecil. Indonesia terus mencoba untuk memberikan pengaruhnya pada berbagai negara demi tercapainya perdamaian dunia. Hal ini terealisasi dengan kontribusi diplomasi pertahanan Indonesia melalui misi perdamaian di Lebanon tahun 2021-2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi militer Indonesia dalam misi perdamaian Lebanon 2021-2022 efektif memperkuat kehadiran dan legitimasi UNIFIL. Kebijakan keamanan dijalankan oleh Force Commander dan Komandan Sektor, dengan peran penasihat militer mendukung integrasi strategi keamanan dan diplomasi. Keterlibatan Indonesia tidak hanya menjaga perdamaian, tetapi juga membangun kerja sama internasional melalui pertukaran teknologi dan pengalaman militer. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kontribusi diplomasi pertahanan Indonesia melalui misi perdamaian di Lebanon pada tahun 2021-2022. Peneliti menganalisis peristiwa berdasarkan pada teori konflik dan diplomasi pertahanan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Informan penelitian meliputi Perwira Operasi Batalyon Mekanik, DANPOS UNP 9-15, Danton Pemeliharaan, dan Bintara Pemeliharaan Kendaraan Tempur Indo Batt.

Kata Kunci : Diplomasi, Perdamaian, UNIFIL

ABSTRACT

Indonesia's peace efforts cannot be said to be small. Indonesia continues to try to exert its influence on various countries in order to achieve world peace. This was realized with the contribution of Indonesia's defense diplomacy through the peace mission in Lebanon in 2021-2022. This research shows that Indonesia's military diplomacy in the 2021-2022 Lebanon peace mission effectively strengthens UNIFIL's presence and legitimacy. Security policy is executed by the Force Commander and Sector Commander, with the role of military advisors supporting the integration of security strategy and diplomacy. Indonesia's involvement not only maintains peace, but also builds international cooperation through the exchange of military technology and experience. The purpose of this study is to explain the contribution of Indonesia's defense diplomacy through the peace mission in Lebanon in 2021-2022. The researcher analyzed the events based on the theory of conflict and defense diplomacy. The researcher used a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and secondary data. Research informants include the Mechanized Battalion Operations Officer, DANPOS UNP 9-15, Maintenance Danton, and Indo Batt Combat Vehicle Maintenance NCO.

Keywords: Diplomacy, Peace, UNIFIL

PENDAHULUAN

Perdamaian dunia merupakan kewajiban dan cita-cita seluruh bangsa dan individu yang hidup di dalamnya. Bagi masyarakat Indonesia, komitmen terhadap misi kerukunyan yang diusung Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak lepas dari visi bangsa Indonesia untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana tertuang

dalam Kata Pengantar UUD 1945.(Pratama, M. I., & Najicha, 2022) Strategi internasional bebas Indonesia memfasilitasi keterlibatannya dalam upaya perdamaian global. Indonesia pertama kali mengirim pasukan penjaga perdamaian pada tahun 1957 ke Sinai, Mesir, untuk menangani konflik antara Badui dan Israel. Partisipasi ini mencerminkan implementasi nilai-nilai strategi internasional Indonesia. Saat ini, lebih dari 1.000 personel TNI terlibat dalam misi penjaga perdamaian PBB, terutama di Lebanon (UNIFIL), serta di Kongo (MONUC), Darfur (UNAMID), Sudan (UNMIS), Nepal (UNMIN), dan Liberia (UNMIL).(Akbar, A., Tahrim, T., Pratiwi, E. Y. R., Nurmanita, M., Utomo, J., Hafid, A., & Mutmainnah, 2022). UNIFIL sendiri merupakan organisasi yang bergerak dalam perlindungan konflik di Lebanon.

Konflik di Lebanon sejak 1970-an berakar pada ketegangan etnis dan agama yang berlangsung selama berabad-abad. Pada era Ottoman, Lebanon adalah wilayah semi-otonom, dengan penguasa Utsmaniyah memanfaatkan elit agama lokal, terutama keluarga Druze dan Maronit. Pada abad ke-19, persaingan antara Druze dan Maronit memuncak, menyebabkan konflik brutal di Gunung Lebanon yang berujung pada otonomi Maronit di bawah perlindungan Eropa. Setelah Perang Dunia I, Lebanon menjadi mandat Perancis, yang mempersiapkan kemerdekaan melalui konstitusi 1926 dan sensus 1932, menciptakan sistem politik berbasis agama dengan presiden Kristen dan perdana menteri Muslim. Kemerdekaan Lebanon dicapai pada 1943 dengan Pakta Nasional yang melarang kedua kelompok mencari dukungan asing. Prinsip ini kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Taif 1989, yang mengakhiri perang saudara.(Salman, n.d.)

Setelah Perang Dunia II, Lebanon menjadi titik stabilitas di kawasan, dengan Pakta Nasional yang menyalurkan konflik ke jalur politik. Namun, pada akhir 1960-an, keretakan mulai muncul akibat perubahan demografi, ketidakefisienan politik, dan ketidakstabilan regional yang dipicu oleh nasionalisme Palestina dan konflik Israel-Palestina. Pada 1970-an, ketegangan memuncak ketika milisi Kristen terbentuk untuk melawan pengaruh PLO, yang berusaha menjadikan Lebanon tempat perlindungan setelah diusir dari Yordania pada 1970. Sementara itu, kelompok Sunni memanfaatkan kehadiran PLO untuk meningkatkan posisi mereka, menyebabkan pecahnya faksi bersenjata. Pada 1975, Perang Saudara Lebanon dimulai ketika milisi Maronit menyerang bus penuh warga sipil.(F.Hibatullah, 2021)

Ketegangan sektarian di Lebanon memuncak pada 1970-an, terutama akibat kedatangan pengungsi terkait PLO. Untuk menghindari pengambilalihan oleh PLO, Suriah memasuki konflik pada 1976, yang membagi negara menjadi zona-zona yang dikuasai Suriah, PLO, dan milisi Maronit. Syiah membentuk milisi Amal untuk memperjuangkan hak mereka, dan beberapa anggota kemudian mendirikan Hizbullah setelah Revolusi Iran. Invasi Israel pada 1982 bertujuan menghancurkan PLO, namun tidak menghasilkan stabilitas. Setelah pembunuhan presiden terpilih Bachir Gemayel, kekerasan meluas di kamp pengungsi Sabra dan Shatila, memicu intervensi pasukan penjaga perdamaian yang akhirnya mundur setelah serangan bom pada 1983. Perdana Menteri Michel Aoun melancarkan perang melawan Suriah pada 1989, tetapi akhirnya dikalahkan setelah Suriah menginvasi wilayah Kristen. Perjanjian Taif 1989 mengakhiri perang saudara, namun ketegangan sektarian tetap ada. Israel terus melihat Lebanon sebagai ancaman, yang tercermin dalam invasi tahun 2006 untuk melawan Hizbullah. Meski kesepakatan damai tercapai, Lebanon tetap terpecah oleh persaingan sektarian dan pengaruh eksternal.

Banyak negara berkontribusi pada perdamaian di Lebanon, termasuk Indonesia, Kamboja, Spanyol, Malaysia, Italia, Korea, Sri Lanka, India, Tanzania, Bangladesh, Prancis, Irlandia, Polandia, Ghana, Cina, Nepal, Serbia, dan Kazakhstan. Selama 21 tahun, 41.184 pasukan telah dikerahkan di Lebanon, dengan jumlah yang terus meningkat. Pada 2020 terdapat 2.539 pasukan, naik menjadi 2.591 pada 2021, dan 2.650 pada 2022. Ini menunjukkan bahwa misi perdamaian di Lebanon telah berlangsung lama dan belum berakhir. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Lebanon pada tahun 1957, dan pada tahun 1960, status delegasinya di Beirut dinaikkan menjadi setingkat kedutaan. (Mudore, 2019) Keterlibatan Indonesia di Lebanon semakin terlihat setelah Perang Lebanon 2006, dengan Indonesia berperan dalam UNIFIL (Pasukan Sementara PBB di Lebanon). Kontribusi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian ini menunjukkan komitmen kuat pada stabilitas regional dan peran penting dalam perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga mengadakan kegiatan sosial seperti pembersihan desa dan pelatihan polisi lokal. Sebagai negara dengan kontribusi besar untuk UNIFIL, Indonesia mengirimkan 1.248 personel militer pada tahun 2019, menunjukkan komitmennya dalam

pemeliharaan perdamaian internasional. Upaya ini mencerminkan strategi internasional Indonesia yang bebas dan dinamis.

Pada tahun 2021-2022, Indonesia mengirimkan 1.299 personel ke Lebanon sebagai bagian dari misi UNIFIL. Kontingen terbesar adalah Batalion Mekanik (Yonmek Indobatt) dengan 850 personel, diikuti oleh Force Protection Company (FPC) dengan 125 personel dan Maritime Task Force (MTF) dengan 119 personel. Personel lainnya termasuk dari Military Police Unit (40), Force Head Quarter Support Unit (30), Military Community Outreach Unit (18), dan unit rumah sakit (9). Di tingkat kepemimpinan, terdapat 17 personel di Military Staff Head Quarter, 11 di Military Staff Sector East, dan 7 di Civilian Military Coordination. Sementara itu, 3 personel bertugas sebagai Staff Officer Maritime Task Force. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya perdamaian di Lebanon, meskipun sering terjadi konflik di perbatasan Lebanon-Israel. (Martani, W. R., Sumertha, I. G., & Hidayat, 2020) Usaha perdamaian Indonesia tidak kecil, dengan upaya terus menerus untuk memberikan pengaruh demi tercapainya perdamaian dunia. Keuntungan dari partisipasi ini termasuk peningkatan soft diplomacy, yang membantu membangun jaringan kerja sama internasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis **Bagaimana kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon sebagai diplomasi pertahanan tahun 2021-2022?**

Penelitian ini mengkaji kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon tahun 2021-2022, sebagai bagian dari diplomasi pertahanan yang mencerminkan politik luar negeri bebas aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi diplomasi pertahanan Indonesia melalui misi perdamaian di Lebanon pada tahun 2021-2022. Beberapa penelitian terdahulu yaitu seperti Studi sebelumnya telah membahas misi perdamaian, diplomasi pertahanan, dan peran Indonesia dalam operasi internasional, dengan fokus pada kontribusi Indonesia dalam UNIFIL di Lebanon dan implementasi diplomasi pertahanan. seperti judul penelitian Peran Female Peacekeepers dalam Misi Perdamaian Indonesia di Lebanon (2015-2017) yang ditulis ni Khairunnisa, Afa Dilla Adeliya (2023) dan Kontribusi Indonesia Dalam Peacekeeping Mission Di Lebanon Sebagai Implementasi Diplomasi Pertahanan yang ditulis Tsabita Afifah Khoirunnisa¹, R. AJ. Feyfil Jannah, Mafazati Qonita, Dena Caristy Tjondrodewi (2022) Penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketimpangan dalam peran female peacekeepers dan

dampak diplomasi pertahanan terhadap citra negara, namun belum banyak yang mengkaji kontribusi Indonesia dalam misi terbaru UNIFIL 2021-2022.

Disisi lain Teori konflik menjelaskan dinamika dan penyelesaian konflik internasional, mencakup pendekatan realis yang fokus pada kekuatan negara dan pendekatan liberal yang menekankan peran institusi internasional serta diplomasi dan Teori Diplomasi pertahanan mencakup konsep dan praktik untuk memperkuat posisi internasional negara, seperti kerjasama internasional, pelatihan bersama, dan partisipasi dalam misi internasional, serta memainkan peran penting dalam membangun kapabilitas dan citra internasional negara. Kerangka berpikir penelitian menyajikan model konseptual untuk menganalisis data, menghubungkan teori konflik, diplomasi pertahanan, dan keterlibatan Indonesia dalam UNIFIL, serta mengevaluasi kontribusi Indonesia secara menyeluruh.

Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang melibatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta analisis data sekunder. Informan dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak, seperti Perwira Operasi Batalyon Mekanik, Komandan Pos UNP 9-15, Danton Pemeliharaan, dan Bintara Pemeliharaan Kendaraan Tempur Indo Batt.

PEMBAHASAN

Mengadvokasi Kepentingan Militer

Dalam misi perdamaian Lebanon, advokasi kepentingan militer melibatkan diplomasi militer persuasif, membangun hubungan baik dengan komunitas lokal, dan pengawasan terhadap Mandat dan ROE (Rules of Engagement). Diplomasi persuasif memperkuat legitimasi UNIFIL di mata penduduk setempat, mendukung stabilitas dan perdamaian. Pematuhan Mandat dan ROE penting untuk memastikan operasi legal dan sesuai dengan tujuan misi. Pendidikan pra- deployment meningkatkan keterampilan militer dan pemahaman tentang Mandat dan ROE, memastikan tindakan yang profesional dan efektif selama misi. ROE adalah pedoman yang mengatur tindakan militer dan penggunaan kekuatan dalam situasi tertentu. ROE bertujuan untuk memberikan kejelasan tindakan dan dasar hukum bagi setiap prajurit dalam pelaksanaan tugas. Dalam situasi

multinasional, ROE juga memfasilitasi kerjasama dan pemahaman bersama antara pasukan dari berbagai negara. Advokasi militer dalam misi perdamaian Lebanon melibatkan penyebaran informasi tentang peran UNIFIL dan tujuan misi kepada komunitas lokal. Pendekatan proaktif ini membangun kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat, mendukung diplomasi, dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Selain itu, koordinasi dengan markas UNIFIL dan memahami mandat serta ROE adalah krusial. Pasukan Garuda berkoordinasi dengan atase pertahanan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, termasuk penggunaan kekuatan dan interaksi dengan warga lokal. Koordinasi ini memastikan tindakan pasukan sesuai dengan mandat dan ROE.

Menurut Superman, S. W. (2023), Pre-Deployment Training (PDT) menawarkan berbagai manfaat signifikan dalam mempersiapkan pasukan untuk operasi pemeliharaan perdamaian. Pertama, PDT meningkatkan kualitas pasukan dengan menyediakan pelatihan yang relevan dengan kondisi di daerah misi, mencakup prinsip, kebijakan, dan implementasi mandat seperti perlindungan warga sipil dan anak-anak. Kedua, pelatihan ini mengembangkan keterampilan khusus, termasuk counter-terrorism, yang penting untuk menghadapi berbagai situasi konflik, baik antarnegara maupun dalam negara. Ketiga, PDT meningkatkan efektivitas pasukan dalam menjalankan tugas staf, dengan mempersiapkan mereka secara menyeluruh sebelum bertugas di daerah operasi. Keempat, pelatihan ini memperbaiki kesiapan logistik pasukan, memastikan mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Terakhir, PDT memperkuat kepatuhan pasukan terhadap aturan dan prosedur operasional, yang penting dalam operasi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan berbagai negara dan organisasi. (U. Prayitno, 2016)

Advokasi kepentingan militer dalam misi perdamaian Lebanon melalui diplomasi militer yang persuasif telah terbukti efektif dalam memperkuat kehadiran dan legitimasi UNIFIL di wilayah operasi. Dengan memprioritaskan hubungan yang baik dengankomunitas lokal dan pihak terkait lainnya, serta dengan penegakan Mandat dan ROE yang konsisten, misi ini mampu menghadapi tantangan dengan proporsionalitas dan profesionalitas yang tinggi. Pendekatan proaktif dalam menyebarkan informasi tentang peran misi perdamaian juga telah membantu membangun kepercayaan dan kerja

sama, yang pada akhirnya mendukung upaya-upaya lebih luas untuk mencapai perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di Lebanon.

Mewakili Otoritas Militer

Dalam misi perdamaian UNIFIL 2021-2022, Force Commander memegang peran kunci sebagai kepala operasional, bertanggung jawab atas pengelolaan strategis dan operasional misi. Mereka mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh personel militer sesuai dengan perintah dari Head of Mission (HoM) atau Force Commander. Struktur komando yang ketat memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan efektif dan efisien, mengikuti Tasking Order yang ditetapkan.

Pendekatan ini mencakup penerapan aturan yang ketat dan disiplin dalam pelaksanaan tugas, serta koordinasi erat dengan pihak-pihak terkait seperti LAF (Lebanese Armed Forces). Koordinasi ini meliputi pemantauan perbatasan, patroli rutin, dan pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.

Kontingen Garuda, sebagai bagian dari pasukan perdamaian Indonesia, harus mematuhi perintah yang diberikan, menjaga keamanan, serta melaksanakan tugas kemanusiaan dan koordinasi dengan pemerintah lokal. Kerjasama dengan LAF sangat penting untuk memahami situasi lokal dan memastikan pelaksanaan misi sesuai dengan mandat PBB.

Penelitian Wibisono (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara otoritas sipil dan militer mempengaruhi pola interaksi, menekankan pentingnya melibatkan militer dalam penyusunan kebijakan untuk memastikan kontrol sipil yang lebih baik dan akuntabilitas dalam hubungan sipil- militer. (Zakky, K. T. D. I. H., & Almubaroq, 2023)

Partisipasi otoritas militer tidak hanya terbatas pada aspek keamanan fisik, tetapi juga meliputi upaya-upaya diplomatik dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya di daerah misi. Mereka berperan aktif dalam mendukung dialog antar pihak yang berkonflik, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, serta mendukung proses perdamaian jangka panjang di Lebanon. Ini mencerminkan pentingnya peran militer dalam menyediakan kestabilan yang diperlukan bagi pembangunan dan rekonsiliasi pasca-konflik di wilayah yang terpengaruh.

Menyediakan Kebijakan Keamanan dan Jaringan Militer

Dalam misi perdamaian UNIFIL selama tahun 2021-2022, perumusan kebijakan keamanan merupakan proses yang melibatkan berbagai tingkatan komando, dimulai dari Komandan di setiap sektor operasional hingga tingkat pusat di markas besar (HQ). Setiap sektor operasional memiliki Komandan yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan operasional yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lokal di area tanggung jawab mereka. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik regional, ancaman keamanan yang ada, serta kebutuhan masyarakat lokal dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian.

Proses perumusan kebijakan tersebut juga sangat memperhatikan peraturan internasional yang berlaku serta mandat yang diberikan oleh PBB kepada misi UNIFIL. Konsultasi dan koordinasi intensif dilakukan antara negara-negara kontributor pasukan untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dan mendukung tujuan-tujuan misi perdamaian. Ini mencakup diskusi tentang strategi operasional, alokasi sumber daya, dan evaluasi terhadap perkembangan terbaru di lapangan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya mencerminkan visi bersama dari negara-negara anggota, tetapi juga didasarkan pada analisis yang teliti dan adaptasi terhadap dinamika situasional yang terus berubah.

“Perumusan kebijakan biasanya tergantung dari Komandan di masing-masing sektor (khusus sektor) maupun di pusat (khusus HQ) yang mana melibatkan jajaran Komandan dari setiap negara untuk merumuskan suatu kebijakan.” (wawancara dengan Kapten Inf. Agung Eko)

Di Indonesia, ada wadah khusus yang bertanggung jawab untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan langkah-langkah terkait partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Tim ini dikenal sebagai Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP). Tugas utamanya adalah memastikan bahwa partisipasi Indonesia dalam misi-misi PBB didasarkan pada kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komandan di sektor-sektor lapangan (misalnya, di wilayah Lebanon) memiliki pemahaman mendalam tentang situasi di lapangan. Mereka merumuskan kebijakan operasional yang relevan dengan tugas pasukan di wilayah tertentu. Di pusat

(headquarters), Komandan juga berperan dalam merumuskan kebijakan yang lebih luas, termasuk koordinasi antara sektor-sektor dan negara-negara yang berpartisipasi. Keterlibatan jajaran Komandan dari berbagai negara memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan. Kebijakan yang dirumuskan harus selaras dengan prinsip-prinsip perdamaian dunia, termasuk menghormati kedaulatan negara, mengutamakan keselamatan warga sipil, dan mematuhi mandat PBB. Tujuan akhirnya adalah mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan membangun hubungan positif dengan masyarakat setempat.

Selama misi UNIFIL 2021-2022, Force Commander memegang peran sentral dalam mengelola operasi dan strategis. Mereka mengeluarkan Operation Orders (OO) dan Tasking Orders (TO) yang memandu setiap unit atau kontingen, termasuk Kontingen Garuda, dalam melaksanakan tugas mereka di lapangan. OO mencakup rencana operasional secara luas, sementara TO fokus pada tugas-tugas harian dan spesifik.

Pasukan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Satuan Tugas CIMIC, berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan pengamanan. Mereka melaksanakan tugas sesuai dengan Job Description, melakukan patroli, serta menyediakan bantuan medis dan interaksi positif dengan komunitas lokal. Kebijakan keamanan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat, serta memantau dan mengawasi area rawan konflik.

Penerapan kebijakan dilakukan melalui koordinasi dengan LAF dan berlandaskan analisis situasi dari Force Commander. Kebijakan ini mencakup pengawasan zona demiliterisasi, patroli rutin, dan respon terhadap insiden kekerasan. Komandan Sektor di lapangan menerapkan kebijakan ini, berkoordinasi dengan unit lain, dan melaporkan hasil operasional kepada Force Commander.

Kebijakan yang diterapkan berfokus pada stabilitas regional dan keamanan lokal, dengan tujuan mendukung kehidupan masyarakat yang damai dan aman di Lebanon Selatan. Keberhasilan misi UNIFIL diukur tidak hanya dari aspek operasional militer tetapi juga dari dampak positif terhadap kehidupan sehari-hari penduduk setempat.

Bertindak sebagai Penasihat Militer Kepada Duta Besar dan Stafnya

Dalam misi UNIFIL 2021-2022, penasihat militer berfungsi sebagai penghubung utama antara kontingen militer dan perwakilan diplomatik, termasuk duta besar. Mereka

memainkan peran penting dalam memberikan analisis mendalam tentang situasi di lapangan, yang meliputi informasi strategis dan taktis yang krusial untuk kebijakan luar negeri Indonesia. Penasihat militer juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), Penmil di PTRI New York, dan Dubes RI di Lebanon, serta berperan sebagai jembatan komunikasi dengan PBB untuk isu-isu mendesak.

Dalam tugasnya, penasihat militer mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen untuk melaporkan situasi terkini kepada atasan di Indonesia dan memberikan arahan kepada personel militer di lapangan untuk memastikan keselamatan serta kepatuhan terhadap protokol. Mereka juga melakukan koordinasi dengan komando UNIFIL dan penasihat militer dari negara lain untuk memastikan kerja sama dan integrasi strategi yang efektif. Selain itu, penasihat militer berperan dalam membangun hubungan baik dengan pemerintah Lebanon dan masyarakat setempat, mendukung stabilitas dan operasi perdamaian lokal. Dengan demikian, penasihat militer memainkan peran kunci dalam menyelaraskan strategi keamanan dengan diplomasi internasional, memastikan bahwa tindakan yang diambil mendukung tujuan misi perdamaian dan kepentingan nasional.

Mengobservasi Kondisi

Selama misi UNIFIL tahun 2021-2022, observasi dilakukan secara teratur dan sistematis untuk memantau keamanan di wilayah perbatasan antara Lebanon dan wilayah yang diduduki Palestina (Israel). UNIFIL melaksanakan kegiatan observasi ini melalui Foot Patrol dan Vehicle Patrol. Foot Patrol melibatkan personel militer yang berjalan kaki, memungkinkan interaksi langsung dengan penduduk lokal dan membangun kepercayaan. Vehicle Patrol menggunakan kendaraan militer untuk meningkatkan jangkauan dan mobilitas dalam memantau area yang lebih luas. Kedua jenis patroli ini saling melengkapi, menciptakan gambaran komprehensif tentang kondisi lapangan dan memungkinkan respons yang tepat waktu terhadap situasi yang berkembang.

Patroli dilakukan sesuai Area of Responsibility (AoR), bertujuan untuk memastikan keamanan dan mendeteksi potensi masalah. Pasukan UNIFIL, Pasukan Bersenjata Lebanon (LAF), dan satuan militer lainnya turut serta dalam patroli ini, bahkan dalam kondisi cuaca yang sulit. Observasi ini mendukung upaya menjaga perdamaian dan

memperkuat interaksi positif dengan komunitas lokal, berkontribusi pada stabilitas di Lebanon Selatan.

Dalam misi UNIFIL tahun 2021-2022, observasi dilakukan secara rutin melalui Foot Patrol dan Vehicle Patrol oleh UNIFIL dan Pasukan Bersenjata Lebanon (LAF). Patroli ini penting untuk memastikan keamanan di wilayah Lebanon Selatan, terutama di sekitar Garis Biru dan Golan Heights. Contoh patrolling termasuk patroli bersama UNIFIL dan LAF melalui pegunungan serta patroli kaki oleh pasukan Ghana yang mengalami ketegangan. Selain itu, UNIFIL melaksanakan inspeksi per triwulan, yaitu COE (Contingent Owned Equipment) dan ORI (Operational Readiness Inspection), untuk memastikan kesiapan peralatan dan operasional kontingen.

Patroli ini membantu memantau situasi keamanan, mendeteksi pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan beradaptasi dengan ancaman yang mungkin muncul. Evaluasi hasil observasi, yang mencakup pemeriksaan peralatan dan kesiapan operasional, juga penting untuk meningkatkan efektivitas dan respon terhadap situasi darurat. Penghargaan seperti UN Medal diberikan kepada personel sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung perdamaian di Lebanon.

Mengawasi dan Mengelola Kegiatan di Bidang Penjangkauan Militer, Diplomasi Pertahanan, dan Kerjasama Keamanan

Dalam misi perdamaian UNIFIL selama tahun 2021-2022, pengawasan dan pengelolaan kegiatan di bidang penjangkauan militer, diplomasi pertahanan, dan kerjasama keamanan dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi. Keterlibatan Indonesia dalam misi PBB, seperti UNIFIL di Lebanon, memperkenalkan militer Indonesia di tingkat internasional dan memperkuat posisi diplomatik Indonesia sebagai aktor yang berkomitmen terhadap stabilitas global.

Koordinasi antara satuan tugas Indonesia dalam misi UNIFIL, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations (Penmil New York), dan Pusat Penugasan Misi Perdamaian PBB (PMPP) TNI sangat penting untuk memastikan operasional yang efektif dan mendukung diplomasi Indonesia. Kerjasama ini memperkuat citra positif Indonesia dalam diplomasi internasional dan mendukung posisi diplomasi pertahanan negara. Dalam kerjasama

keamanan, UNIFIL melaksanakan patroli independen dan bersama dengan angkatan bersenjata Lebanon (LAF) serta negara-negara kontributor lainnya, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas operasional.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam UNIFIL memperkenalkan militer Indonesia di tingkat internasional, mendukung implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB, dan memungkinkan partisipasi dalam forum internasional untuk memperluas jaringan diplomasi pertahanan. Pengawasan dan pengelolaan kegiatan melibatkan komunikasi langsung dengan LAF untuk memantau dan merespons situasi keamanan, serta dukungan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas LAF. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perdamaian global tetapi juga memperkuat posisi diplomatis dan keamanan Indonesia di panggung internasional.

Mempromosikan Industri Persenjataan

Selama misi perdamaian UNIFIL 2021-2022, Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan industri persenjataan domestik dengan menggunakan senapan buatan PT Pindad. Penggunaan peralatan militer buatan dalam negeri ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas teknologi Indonesia di panggung internasional dan mengurangi ketergantungan pada impor senjata. Partisipasi dalam turnamen menembak UNIFIL memperkenalkan produk Indonesia kepada komunitas internasional dan meningkatkan citra industri pertahanan nasional.

Keterlibatan ini tidak hanya menegaskan kemampuan teknis produk Indonesia tetapi juga memperkuat posisi diplomatis Indonesia dengan membangun hubungan dan kepercayaan dengan negara-negara lain. Selain itu, kegiatan seperti perlombaan menembak dan pelatihan senjata di UNIFIL juga menjadi platform untuk mempromosikan teknologi dan inovasi dalam industri pertahanan, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global dan kemandirian dalam pertahanan. Indonesia memanfaatkan keikutsertaannya dalam misi PBB sebagai platform untuk memperkenalkan diri secara internasional dan mempromosikan peran serta kontribusi militer Indonesia dalam konteks global. Langkah ini tidak hanya menguatkan reputasi Indonesia sebagai pemain penting dalam menjaga perdamaian internasional, tetapi juga sebagai negara yang komitmen terhadap kerja sama multilateral dalam membangun stabilitas global.

Di bidang penjangkauan militer, Indonesia aktif terlibat dalam dialog multilateral dan bilateral dengan negara-negara mitra serta organisasi internasional terkait. Melalui partisipasi ini, Indonesia tidak hanya membangun jaringan kerjasama yang kuat, tetapi juga memperluas pemahaman bersama tentang tantangan keamanan global dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Dengan demikian, pengelolaan kegiatan di bidang penjangkauan militer tidak hanya menjadi sarana untuk mempromosikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai upaya aktif dalam membangun harmoni dan solidaritas internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.

Melopori Tanggap Darurat dan Upaya Bantuan Ketika Krisis Muncul

Dalam misi perdamaian UNIFIL 2021-2022, tanggap darurat dan bantuan krisis menjadi krusial untuk menjaga keamanan personel dan penduduk lokal di Lebanon Selatan. Personel UNIFIL dilatih untuk merespons situasi darurat dengan cepat, menggunakan shelter atau bunker untuk perlindungan terhadap serangan atau ancaman. Fasilitas ini mendukung kemampuan operasional UNIFIL dan memastikan keselamatan personel serta kelancaran tugas mereka.

Kontingen Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan seperti penyaluran alat medis selama pandemi Covid-19 dan menyediakan perlindungan kepada warga sipil dalam situasi darurat dengan memanfaatkan camp mereka. Koordinasi dengan UNIFIL dan pihak terkait penting untuk respons yang efektif dan aman. UNIFIL menerapkan Contingency Plan untuk menghadapi krisis seperti konflik bersenjata atau bencana alam. Rencana ini, yang melibatkan latihan rutin, memastikan kesiapan dalam merespons situasi darurat dan memberikan bantuan kemanusiaan secara efektif. Evaluasi dan peningkatan dilakukan setelah setiap krisis untuk memperbaiki prosedur. Dalam situasi darurat seperti baku tembak, UNIFIL berperan dalam memantau gencatan senjata dan merespons secara cepat.

Selama misi perdamaian UNIFIL 2021-2022, pasukan perdamaian tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga aktif dalam bantuan kemanusiaan, termasuk distribusi makanan dan bantuan medis kepada masyarakat terdampak konflik. Kegiatan ini penting untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat lokal dan memperkuat stabilitas wilayah. UNIFIL bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk

meningkatkan efektivitas misi dan mengoordinasikan bantuan. Evaluasi dan pengawasan berkala dilakukan untuk menilai situasi dan efektivitas respons krisis. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan pemerintah Lebanon juga penting untuk mendukung rekonsiliasi dan pembangunan pasca-konflik. Secara keseluruhan, UNIFIL mengimplementasikan Contingency Plan yang terstruktur untuk respons cepat, koordinatif, dan berbasis kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan kontribusi diplomasi pertahanan Indonesia dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon selama 2021-2022. Advokasi kepentingan militer Indonesia, melalui diplomasi militer persuasif, efektif memperkuat legitimasi UNIFIL di wilayah operasi dengan memprioritaskan hubungan baik dengan komunitas lokal dan penerapan Mandat serta ROE yang konsisten. Kontingen Garuda, yang bertanggung jawab atas perbatasan Lebanon- Israel, berperan dalam menghadapi tantangan dengan profesionalisme tinggi. Kebijakan keamanan diimplementasikan oleh Komandan Sektor, memastikan misi berjalan sesuai tujuan dan adaptif. Peran penasihat militer dalam misi UNIFIL juga penting untuk integrasi strategi keamanan dan diplomasi. Observasi rutin oleh tim UNIFIL dan kontingen negara-negara terlibat penting untuk memantau situasi keamanan dan kepatuhan terhadap mandat PBB. Keterlibatan Indonesia juga membangun jejaring kerja sama dengan negara lain dan mendukung upaya tanggap darurat serta bantuan kemanusiaan, dengan Contingency Plan yang terstruktur dan pelatihan berkala untuk menghadapi tantangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Tahrim, T., Pratiwi, E. Y. R., Nurmanita, M., Utomo, J., Hafid, A., & Mutmainnah, I. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- F.Hibatullah. (2021). *Politik Konfesionalisme Lebanon: Sebuah Pilihan atas Keberagaman Agama*.
- Martani, W. R., Sumertha, I. G., & Hidayat, E. R. (2020). Peran Standby Force Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (Pmpp Tni) Dalam

Mempersiapkan Pasukan Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6 (1).

Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, 12(2), 170-181170–181181.

Pratama, M. I., & Najicha, F. U. (2022). Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Setiap Individu Dengan Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Globalisasi Saat ini. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1403–1409.

Salman, M. (n.d.). Colonialism, Confessionalism, and Collapse: The Causes and Struggles of Modern Lebanese Democracy. *Hemispheres*, 45.

U.Prayitno. (2016). Efektivitas Pre-Deployment Training dalam Rangka Penyiapan Tugas

Milstaff Seceast UNIFIL. *Jurnal Sekolah Staf Dan Komando TNI AD*.

Zakky, K. T. D. I. H., & Almubaroq, S. P. (2023). *Bahan Ajar Strategi Pertahanan. Indonesia Emas Group*.